

**Catatan Pertemuan
Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VIII
Jakarta, 2 November 2012**

1. Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Caroline Tupamahu

- Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Yayasan BaKTI) resmi beroperasi sebagai Yayasan pada tahun 2010. Selain memfasilitasi pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di KTI, salah satu fungsi utama Yayasan BaKTI adalah menjadi sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia termasuk Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI).
- Sebagai satu-satunya lembaga yang memfokuskan diri pada pengelolaan pengetahuan pembangunan di KTI, Yayasan BaKTI melihat pentingnya peran ini untuk dikembangkan secara lebih mandiri, profesional dan berkelanjutan. BaKTI akan berkiprah secara lebih efektif dalam menjawab tantangan kesenjangan akses informasi dan pertukaran pengetahuan yang diyakini sebagai salah satu tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Langkah ke sana dilakukan dengan memperluas jaringan kerja BaKTI hingga ke level kabupaten, mempererat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta media untuk penyebarluasan cerita-cerita keberhasilan pembangunan di KTI, serta secara aktif melakukan identifikasi praktik-praktik cerdas baru dari KTI dan mendorong replikasi/adopsi.
- Sejak Pertemuan Forum KTI yang keempat pada tahun 2009 di Makassar, BaKTI/Forum KTI menampilkan berbagai Praktik Cerdas yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Ide besarnya adalah untuk mengubah cara pandang kita terhadap Kawasan Timur Indonesia. Sudah waktunya mengubah pandangan lama bahwa KTI terbelakang dan miskin, karena dalam perjalanan kami bekerja, kami menemukan banyak sekali inovasi dan praktik cerdas dari masyarakat KTI yang pantang menyerah. Hanya saja inovasi dan praktik cerdas ini belum banyak didokumentasikan, diketahui, dan dipublikasikan secara luas oleh berbagai media yang ada. Disinilah BaKTI berperan agar praktik-praktik cerdas ini dapat diketahui dan dapat direplikasi tentunya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
- Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VIII ini mendapat dukungan dari Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD) dan CIDA. Terima kasih untuk AIPD dan CIDA. Terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Bappenas yang memberi dukungan dalam penentuan tema pertemuan dan juga nara sumber untuk kegiatan ini.

2. Sambutan Ketua Kelompok Kerja Forum KTI, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS

- Forum Kawasan Timur Indonesia hadir untuk menjembatani para *stakeholders* untuk berinteraksi. Interaksi ini bermanfaat untuk membangun kepercayaan yang mengarah pada reformasi dan mendorong proses pembangunan yang lebih efektif. Forum KTI merupakan forum terbuka bagi para reformis pembangunan, terutama reformis yang berada di kawasan ini. Forum KTI telah mengadakan pertemuan sebanyak 6 kali. Pertemuan yang ke enam baru saja kami laksanakan pada tgl 24-25 September di Palu yang lalu dengan tema: Merajut Inspirasi, Persembahan dari

Timur untuk Indonesia. Pertemuan ini dibuka dengan resmi oleh Ibu Menteri Kesehatan dan mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu. Kurang lebih 500 pelaku pembangunan hadir pada pertemuan tersebut.

- Anggota Forum KTI berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Mereka adalah pembaharu sosial di bidang masing-masing yang senantiasa membangun relasi antar pihak dan antar daerah untuk membangun kemitraan dan inovasi sosial untuk membangun Kawasan Timur Indonesia yang lebih baik.
- Forum KTI memiliki dua sub jaringan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di Kawasan Timur Indonesia yaitu Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) dan Forum Kepala Bappeda. JiKTI merupakan jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia dan berfungsi untuk mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Forum Kepala Bappeda terdiri atas Kepala Bappeda Provinsi dari dua belas provinsi di KTI dan berfokus pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.
- Hingga saat ini sudah dilaksanakan delapan kali pertemuan dan hubungan antar Kepala Bappeda Provinsi se-KTI semakin kompak, pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi menjadi Forum tukar solusi antar Kepala Bappeda. Demikian juga hubungan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, koordinasinya semakin kuat. Ibu Menteri Bappenas sendiri hadir pada Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi ke-6 di Jakarta. Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI memberikan input resmi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2012 dan Masterplan untuk Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
- Melalui Forum Kepala Bappeda Provinsi yang cakupan wilayahnya meliputi 4 pulau besar yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, diharapkan dapat memberikan masukan pada RPJMN 2015-2019 yang berdimensi kewilayahan.
- Pada Pertemuan hari ini juga akan dilaksanakan pemilihan Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dimana sebelumnya Prof. Winarni adalah Koordinatornya tetapi berhubung saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bappeda, maka pemilihan Koordinator diharapkan dapat berlangsung secara informal pada akhir pertemuan hari ini.

3. Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sekaligus membuka Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VIII dengan resmi

3 hal yang menjadi highlights:

- a) Persiapan penyusunan RPJMN 2015-2019 (Tahapan ke 3 dari RPJPN-Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
Sebagaimana diketahui RPJMN 2015-2019 ini efektif pemberlakuannya pada Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden & Wapres – Oktober 2014). Tentunya

penyusunannya tidak bisa mendadak, maka mulai 2013 didedikasikan waktu untuk melakukan serangkaian *back ground studies* (naskah akademik) yang intinya untuk menyiapkan frame work, persiapan dari sisi sektoral dan juga aspek regional (kewilayahan) dan semuanya ini harus merupakan satu kesatuan. Tentunya back ground studies ini tidak semuanya hal baru, namun juga dari kajian atau study-study yang sudah dilaksanakan oleh akademisi, mitra internasional termasuk study yang direlease oleh McKinsey Global Institute (dari kaca mata swasta yang akan direlease oleh KEN – Komite Ekonomi Nasional). Tentunya tidak hanya sekedar study atau kajian tetapi juga ada stakeholder meeting yang akan dilaksanakan mulai tahun 2013 untuk menjadi dasar penyusunan draft RPJMN. Tugas Bappenas adalah juga menerjemahkan visi dan misi presiden dan wapres terpilih dan membuatnya menjadi dokumen yang konsisten dengan RPJP 2005-2025 dan bisa menjadi suatu program/kebijakan yang *realistis, applicable dan sustainable*. Back ground studies ini menjadi amunisi saat menyusun RPJMN dan memastikan adanya benang merah dengan dokumen sebelumnya (*change and continuity*). Pertemuan Forum Kepala Bappeda hari ini menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan dan yang belum terlaksana bisa dikejar pada tahun 2013.

- b) *Sharing lesson learned* hasil kunjungan kerja ke China terkait pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur
- China adalah negara yang saat ini pencapaian pembangunannya sangat signifikan terlepas dari kelemahan-kelemahannya.
 - Terkait pengentasan kemiskinan, China memberi kontribusi yang sangat besar untuk pencapaian target global MDGs. Ada beberapa komponen yang menyebabkan kemiskinan turun, salah satunya adalah pembangunan ekonomi yang cepat yang membuka kesempatan kerja yang sangat besar dan berujung pada peningkatan livelihood masyarakat. Kedua, adalah pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang sangat komprehensif. Ketiga, pembangunan di desa (agriculture dan infrastruktur desa) sangat bagus. Yang menarik adalah China mengembangkan mekanisme cost sharing, incentives dan disincentives di sistem jaminan sosialnya.
 - Infrastruktur di China berjalan dengan cepat dan massive hingga ke desa. Informasi ini didapat sewaktu kunjungan ke Bappenas China yang merupakan super ministry dengan 3 wakil (minister). China itu tahun 1980 GDPnya hanya 300 (less developed country), saat ini GDPnya 6000. Yang menjalankan pembangunan adalah BUMN dan BUMD dan pembiayaannya oleh Bank Pembangunan (Bank of China, Construction Bank of China, Agriculture Bank of China). Proyek-proyek infrastruktur diberikan ke BUMN dan BUMD, bukan ke pemerintah dan swasta. Uangnya diputar di sana. Tidak ada pemerintah yang melaksanakan proyek-proyek besar seperti Kementerian PU di Indonesia. Bagaimana mereka mengontrol? Selalu ada pejabat (perwakilan dari Partai Komunis) yang menjadi komisaris dan sekaligus menjadi chanel ke Partai Komunis dan sekaligus mengawasi. Setelah BUMN/BUMD berkembang, mereka langsung listed/go public di Stock Exchange sehingga terkontrol. Untuk BUMN/BUMD yang besar-besar, mereka melaksanakan proyek di luar negeri dan mendapatkan aid/loan yang berada dibawah kontrol Ministry of Commerce.

- Infrastruktur bisa dibangun dengan cepat dan massive karena mereka tidak mengandalkan APBN, tetapi uangnya diputar dari Bank Pembangunan, BUMN dan BUMD. Yang berbeda dengan Indonesia adalah di China tidak ada masalah tanah, masalah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan juga tidak ada masalah entrepreneurship. Jadi mekanisme ini cepat berkembangnya. Ini menjadi catatan bagi kita sebagai pembelajaran. Tentunya dalam konteks Indonesia, dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kita lihat apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran.
- c) Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMN 2015-2019
 - Apa yang mesti diubah oleh Indonesia setelah reformasi? Kita mesti memikirkan pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan, jangan melulu infrastruktur.
 - Contoh: Kita mengembangkan program SUN (Scaling Up Nutrition). Sistem kita hanya per sektor, pendidikan semuanya urusan pendidikan, kesehatan semuanya kesehatan, tidak ada kerja sama antar sektor. Padahal untuk pembangunan anak, semua sektor harus bekerja sama. Dalam SUN, tidak mungkin semua dibebankan kepada pemerintah pusat. Keberhasilan ditentukan 70% dari makro-nasional, 30% ditentukan oleh level masyarakat/rumah tangga dan individu. Bagaimana mengaitkan kerja sama sektoral? Ini tugas daerah untuk mengintegrasikan hal ini.
 - Thailand itu unemployment dan poverty ratenya rendah walaupun kondisi politiknya tidak stabil. Hal ini karena masyarakatnya kreatif. Masyarakat perlu terus diberdayakan.
 - Kita juga perlu saling belajar dari praktik baik dan lesson learned, terus sharing seperti yang dilakukan oleh Forum KTI dan BaKTI. Bagaimana tercipta saling belajar antar daerah, tidak perlu belajar dari luar negeri terus. Hal inilah yang menjadi bahan bagi Bappeda-Bappeda untuk dikaji lagi dan menjadi masukan bagi RPJMN 2015-2019. Diharapkan juga untuk target-target 2013-14, pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum tercapai untuk dapat direalisasikan.

**4. Presentasi Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas-
Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA - Pembangunan Berdimensi Wilayah Dan
Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan Provinsi, Regional, Dan Nasional**

RPJMN 2015-2019 tahapan ke-3 sesuai arah RPJP adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, membaiknya indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan (disparitas antar wilayah, percepatan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa). Pembangunan sektoral di daerah adalah mengarahkan dan menjaga sinergi antar sektor, sinergi antar pusat daerah dan kebijakan penganggaran. Pembangunan daerah itu sendiri mencakup mengarahkan kerjasama antardaerah dan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Daerah termasuk aparatur, kelembagaan, keuangan sehingga SPM terbentuk dan terlaksana.

Pegangan Bappenas dalam pembangunan daerah adalah blueprint perencanaan yang telah diagendakan oleh daerah dan oleh pusat melalui berbagai dokumen perencanaan baik dalam RPJMN, RPJMD, Masterplan. Point penting didalam

pembangunan daerah adalah capacity building, karena uang bukan merupakan masalah utama pembangunan. Contoh: Di Papua dana begitu besar (DAU, DAK, OTSUS, dll) namun tidak ada perubahan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat Papua.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan II 2012 secara umum menunjukkan kecenderungan pelambatan

- Sumber pelambatan adalah melemahnya kinerja ekspor sebagai sumber pertumbuhan di beberapa daerah
- Namun demikian permintaan domestik masih cukup kuat sehingga mampu menjaga pertumbuhan pada kisaran 6 persen (yoy).

Wilayah Sulawesi tetap melanjutkan tren pertumbuhan tinggi

- Pertumbuhan provinsi pada triwulan II berkisar antara 7,47 – 11,21 persen
- Namun kinerja pertumbuhan sektor pertanian cenderung melambat, demikian juga industri pengolahan

Pertumbuhan di wilayah Nusa Tenggara termasuk yang paling rendah dengan kisaran 2,76 – 4,76 persen

- Pertumbuhan NTT didorong oleh konsumsi dan investasi
 - Rendahnya pertumbuhan NTB dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan
- Perbedaan kinerja pertumbuhan yang tajam terjadi antara Provinsi Papua Barat (23,69 persen) dan Provinsi Papua (-3,62 persen), yoy.
- Kinerja ekspor cenderung mengalami penurunan, sementara impor relatif stabil
 - Kinerja pertumbuhan Papua Barat didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, bangunan, dan pertambangan, yang sejalan dengan pertumbuhan investasi (PMTB)

Berikut data kesenjangan antar wilayah di KTI:

- Tingkat kesenjangan antar provinsi menunjukkan penurunan jika diukur dengan PDRB/kapita.
- Namun bila diukur dengan konsumsi/kapita, tingkat kesenjangan menunjukkan tren peningkatan (konsisten dengan peningkatan Rasio Gini).
- Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi semakin tersebar tetapi belum diikuti pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Isu-isu strategis wilayah KTI dalam RKP 2013:

Berkaitan dengan peningkatan daya saing:

- Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)
- Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity
- Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
- Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda

Isu Strategis Nasional

Berkaitan dengan peningkatan daya tahan ekonomi:

- Ketahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
- Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Berkaitan dengan peningkatan dan perluasan kesra:

- Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
- Percepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4

Berkaitan dengan pemantapan stabilitas Sospol:

- Persiapan pemilu 2014
- Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
- Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

Pertumbuhan ekonomi Wilayah KTI ke depan diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tren membaiknya sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Ke Depan

Memperkuat perekonomian domestik

- Mendorong aglomerasi di luar Jawa untuk memperbaiki struktur perekonomian domestik
- Meningkatkan konektivitas intra dan antarwilayah

Menggeser orientasi alokasi belanja pemerintah

- Mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur wilayah di Jawa-Bali & Sumatera
- Meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di Indonesia Timur

Mempercepat realisasi MP3EI

- Fokus pada infrastruktur utama di setiap koridor ekonomi
- Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta mengintensifkan koordinasi dengan dunia usaha

Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan NTT

Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah:

- Proses pelaksanaan Desentralisasi dari Pusat ke Daerah untuk memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mampu menjamin ketepatan dan kecepatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
- Proses pelaksanaan Kewenangan Pusat (kewenangan Kementerian/Lembaga) dan pelaksanaan kewenangan Pusat yang dikerjasamakan dengan Daerah (melalui Dekonsentrasi kepada Pemda Provinsi dan Tugas Pembantuan kepada Pemda Kabupaten/Kota).
- Koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi antara Pusat dan Daerah dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah secara sistemik dan berkelanjutan.

Kondisi Keuangan Daerah: sisi penerimaan bergantung pada dana transfer

Berdasarkan data dari 33 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 kota, diketahui bahwa sejak tahun 2007-2011 proporsi PAD sebagai pendapatan daerah meningkat. Namun komposisi dari pendapatan APBD masih didominasi oleh Dana Perimbangan (> 70%).

Belanja pegawai sangat mendominasi belanja daerah. Dari tahun ke tahun porsi belanja pegawai dalam APBD terus meningkat, baik nominal maupun persinya (40% di tahun 2007 naik hingga 45% tahun 2011), sementara porsi belanja modal terus turun (32% di tahun 2007, terus turun hingga menjadi 22% di tahun 2011).

Penyerapan belanja modal sangat lambat. Sampai dengan triwulan III masih berkisar 35%, dan akhirnya pada akhir tahun tetap masih dibawah 90%. Penyerapan yang kurang optimal menyebabkan SiLPA masih cenderung tinggi sehingga menjadi dana idle daerah.

5. Presentasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas - Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc: Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur di KTI 2015-2019

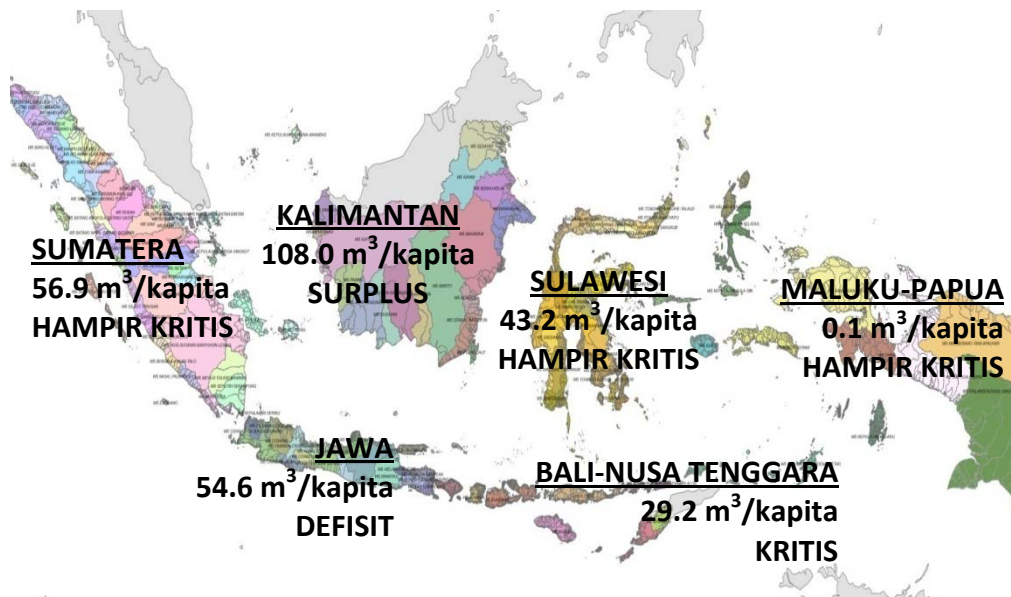
- Usul untuk penyusunan RPJMN 2015-2019:

- Dengan Forum seperti ini, alangkah baiknya hasil back ground studies nanti disharing ke Forum ini dan Forum-Forum lainnya supaya prioritas-prioritas daerah bisa terakomodir di dalam dokumen RPJMN.
- Perlu dicari perbandingan/benchmarking, bandingkan kondisi daerah anda dengan daerah-daerah lain, kemudian bandingkan dengan dunia bagaimana.
- Perlu *pick up* proyek-proyek monumental dan masukkan dalam RPJMN 2015-2019.

- Pada dasarnya pada RPJMN kita masukkan:

- Kondisi infrastruktur saat ini, permasalahan, tantangan kedepan, dan target
- Arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2015-2019
 - Arah RPJP 2005-2025 infrastruktur
 - Pengembangan koridor ekonomi nasional (MP3EI)
 - Rencana induk sistem logistik nasional
 - Prioritas kebijakan masing-masing sub bidang infrastruktur
- Indikasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2015-2019
Rule of Thumb: 5% dari GDP batas minimal untuk pembangunan infrastruktur. Indonesia saat ini baru 4, 1% (China: 10%, India: 8%).
- Setelah itu kita melihat peluang globalnya seperti apa, keterkaitan antar wilayah bagaimana, dan visi 2025. Kita bandingkan juga posisi Indonesia dengan negara-negara lain (*Global Competitiveness Index* (GCI) yang dikerjakan oleh World Economic Forum.

- **Kondisi daya tampung air di seluruh Indonesia**



Potensi air di Indonesia: 3.096 Milyar meter kubik. Tahun 2012 Indonesia hanya punya 54 meter kubik per kapita. Sementara Thailand tahun 2003 saja sudah 1,200 meter kubik. Artinya di Indonesia, pada musim hujan akan terus banjir dan pada musim kemarau akan kekeringan, padahal air kita berlimpah. Apabila melihat potensi per pulau, hanya Kalimantan saja yang surplus, air ada tapi tidak ditampung dimana pembangunan irigasi, dam, embung tidak menjadi prioritas pembangunan. Ada permasalahan pada kewenangan pusat dan daerah. Irigasi nasional yang saat ini 7,2 juta hektar (40% pusat rusak dan daerah 60% rusak). Untuk jalan, jalan nasional rusak 14%, baik 86% (hasil survey World Bank tahun 2012). Jalan rusak di nasional: 14%, provinsi: 27%, kab/kota: 57%, Overall, seluruh nasional rusak 46%, baik 54%. Standar internasional: minimum 70% harus baik. Irigasi dan jalan dengan kondisi seperti itu sangat memprihatinkan. Pusat sudah mulai melaksanakan hibah air minum dan hibah jalan (grant dari Australia). Tahun 2013 kami akan coba hibah jalan di provinsi NTB. Apabila berhasil akan dipikirkan untuk provinsi-propvinsi lain di KTI. Mudah-mudahan untuk RPJMN bisa memasukkan prioritas irigasi dan jalan.

Kondisi KTI terkait akses terhadap air minum masih di bawah standard dan harus menjadi prioritas. Sangat penting untuk kita angkat agar menjadi pendanaan daerah dimana pusat tidak bisa intervensi (selain mekasnime hibah).

- Kalau sudah ada target, bagaimana dengan pembiayaan? Tidak mungkin sepenuhnya oleh pemerintah. Harus dicari mekanisme lain, contohnya PPP (Public Private Partnership). PPP di Jawa mungkin financially, lebih viable. Tapi KTI jangan khawatir, apabila ERRnya (Economic Rate of Return) kurang, sudah dimungkinkan pemerintah memberi dukungan dalam bentuk VGF (Viability Gap Funding). Contoh: Jalan tol Manado-Bitung butuh dana (investasi) 5 trilyun dengan ERR hanya 10%. Tidak ada

investor yg mau investasi, investor mengharapkan ERR 17%. Supaya ERR 17% tercapai, investasinya harus 3 trilyun. Sisa 2 trilyun akan disiapkan oleh pemerintah (VGF). Ini sudah ada perpres dan permen-nya. Bagaimana apabila yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah 3.5 atau 4 trilyun? Peraturan saat ini melalui VGF adalah pemerintah pusat menanggung maksimal 50% dari total, sisanya pemerintah daerah yang harus menanggung pembiayaannya.

- Bagaimana menentukan anggaran? Bagaimana mencapai target 5% GDP? Harus membuat prediksi economic growthnya berapa dan diambil 5% berapa dan ada gapnya berapa? Gap inilah yg dipresentasikan dimana-mana untuk bagaimana mengisi gap ini (ke pemerintah pusat, donor countries, dll).
- Intinya pemerintah daerah harus bisa mengemas program di daerah secara atraktif dan harus punya semangat salesmanship dan entrepreneurship supaya atraktif bagi sumber-sumber pembiayaan.

6. Presentasi Jaringan Peneliti KTI (JiKTI)

a) Sekilas JiKTI - Haslinda Yusuf

- JiKTI digagas oleh Forum KTI untuk mendorong pembangunan berbasis pengetahuan dan mendorong hubungan yang kuat antara pengambil kebijakan dengan peneliti.
- Pembentukan JiKTI merupakan bentuk dukungan sektor pengetahuan dalam pembangunan.
- Keberadaan JiKTI merupakan upaya kelembagaan dalam mendorong penelitian sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan.
- JiKTI sebagai media untuk membangun relasi/kolaborasi antara para peneliti se-KTI dan merupakan satu-satunya jaringan peneliti di tingkat regional KTI.

Jejaring JiKTI

- Pada Skala Internasional JiKTI telah berjejaring dengan AIGRP (Australia Indonesia Governance for Research dan Charles Darwin Univeristy) melalui kegiatan mentoring pada tahun 2008.
- Pada Skala nasional JiKTI telah mengawali jejaring dengan LIPI melalui pembuatan Direktori Peneliti, Direktori Hasil Penelitian dan Direktori Lembaga Penelitian di KTI.
- Pada skala lokal JiKTI sebagai bagian dari Forum KTI telah terhubung dengan Forum Kepala Bappeda yang juga merupakan sub-jaringan yang digagas oleh FKTI.
- Focal Point JiKTI di provinsi juga berjejaring dengan pemerintah daerah dan lembaga penelitian di tingkat daerah masing - masing.

Produk Kebijakan JiKTI

POLICY PAPER JiKTI:

- Design strategi untuk mengakselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan (2011).
- Optimalisasi Bank Data: Hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (2011).

- Reorientasi Kebijakan program unggulan Bumi Sejuta sapi di Nusa Tenggara Barat (2011).
- Merekonstruksi Penanganan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (2010).
- Social capital and marine resources among coastal communities in eastern Indonesia (kerjasama dengan AIGRP – 2008).

Perkembangan JiKTI

- Dukungan Program Knowledge Sector AusAID yang dikelola oleh The Asia Foundation.
- Fokus pada penataan kelembagaan / organisasi JiKTI.
- Peningkatan kapasitas anggota jaringan
- JiKTI didukung dengan pengelolaan manajemen di bawah naungan Yayasan BaKTI.
- JiKTI memiliki struktur yang terdiri dari Koordinator, Focal Point, anggota, dan Dewan Panel JiKTI.
- Sebagai salah satu sub-jaringan dari Forum KTI, maka Dewan Panel JiKTI terdiri dari elemen FKTI – BaKTI termasuk Direktur Eksekutif BaKTI, Koordinator PoKJA FKTI, Koordinator Dewan Penasihat BaKTI, dan Koordinator Forum Kepala Bappeda.

b) Capaian dan Tantangan Pembangunan KTI – Abdul Madjid Sallatu (Koordinator Ad Interim JiKTI)

- Apabila kita perhatikan perkembangan KTI sekarang, nampaknya variabel makro masih sangat penting untuk kita perhatikan. Apakah variabel makro itu bisa bercerita untuk bisa sampai ke level mikro, baik mikro wilayah maupun sektoral. Sebenarnya tantangannya berada pada skala mikro. Pada pertemuan di Kendari beberapa waktu yang lalu mengenai data Sulawesi, sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan pada skala mikro. Dari skala makro kita mencoba melihat bagaimana mikronya, untuk kemudian adakah yang bisa disinergikan dan disinkronisasikan pada skala kawasan dan pada saat yang sama apa yang bisa kita cermati pada masing-masing provinsi.
- Tantangan umum yg kita hadapi adalah kesenjangan antara Barat dan Timur masih jadi permasalahan, namun KTI juga harus memaksimalkan kontribusinya pada skala nasional. Dari data yang ada pada presentasi (diolah dari bank Dunia), fluktuasi pertumbuhan di Papua sangat tajam, yang lain masih dalam trend yang naik, di NTB ada sedikit penurunan dalam pertumbuhannya tahun 2011. Tantangan buat kita adalah bisakah pertumbuhan itu kita pertahankan dalam region tinggi dan sustainable? Apabila berfluktuasi, ini menjadi persoalan. Apakah pertumbuhan bisa menekan laju pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan? Bisakah pertumbuhan memperkuat struktur masyarakat? Tantangan ini harus kita jawab apabila kita ingin memperkecil gap dengan kawasan lain atau memperbesar kontribusi KTI dalam skala pembangunan nasional.
- Setelah kita lihat gambaran detailnya, ternyata ada kebijakan yang harus diselesaikan di tingkat nasional. Ibu Menteri tadi sampaikan ada 70% di level nasional, 30% berada dalam kewenangan daerah (domain daerah) yang bisa dikembangkan seperti pembangunan SDM, penanggulangan kemiskinan, dll. Angka tahun 2011, bisa kita lihat dari file presentasi, Papua Barat sangat ekstrim peningkatannya, sedangkan provinsi lain rata-rata di atas nasional. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat

manfaat dari pertumbuhan di atas rata-rata nasional? Yang bisa jawab adalah daerah itu sendiri. Jika kita ingat pada data yang kita ulas pada pertemuan Forum Kepala Bappeda tahun lalu, yang jadi persoalan adalah kerja sama kab/kota didalam 1 provinsi patut dicermati. Yang paling menarik adalah ternyata di setiap provinsi, terdapat gap yang begitu besar antara 1 kab/kota dengan kab/kota yang lain.

- Pertanyaan untuk kita dalam kaitannya dengan RPJMN 2015-19, intervensi kebijakan apa yang kita harapkan dari skala nasional jika kita ingin perbesar kontribusi perekonomian KTI untuk nasional? Apa yang bisa kita ajukan? Biasanya jawabannya adalah infrastruktur. Menurut studi Bank Dunia dalam Studi Diagnosa di Sulawesi, ternyata infrastruktur tidak terlalu menjamin bahwa produktivitas di daerah itu bisa meningkat, bahkan terjadi pergeseran. Gambarnya dalam kasus Sulawesi, mengapa produktivitas pertanian sedikit ada kenaikan, itu karena ada pergeseran angkatan kerja ke sektor yang lain. Tetapi dikhawatirkan justru ketidaksiapan angkatan kerja kita di KTI bergeser ke sektor yang lain, itu justru akan menarik turun produktivitas sektor yang sudah bagus pertumbuhannya. Hal ini berada dalam kewenangan kebijakan daerah. Ini tidak bisa dilihat berada dalam domain kebijakan pusat. Gambaran-gambaran yang ada di sini merupakan gambaran makro, tapi linkagesnya ke skala mikro tetap bisa terlihat.
- Rata-rata provinsi bertumbuh di atas rata-rata nasional. Tetapi jika kita bandingkan tingkat pengangguran di KTI, sudah mulai turun, tapi tidak cukup besar sebenarnya. Karena tingkat pengangguran di KTI, beberapa masih berada di atas rata-rata nasional. Artinya pertumbuhan itu sendiri belum bisa menyelesaikan permasalahan kesempatan kerja. Hasil kajian Bank Dunia memperlihatkan bahwa ini terkait dengan produktivitas manusia dan sumber daya di KTI. Kemiskinan juga sudah mulai turun di KTI walaupun sejumlah daerah di KTI masih di atas rata-rata nasional. Nampaknya elastisitas pertumbuhan dalam menekan tingkat kemiskinan di Sulawesi, masih di bawah rata-rata nasional. Sekarang ini, elastisitas pertumbuhan di Sulawesi untuk menekan kemiskinan itu cuma 1.5 %, pada saat yg sama ditingkat nasional 1.9%. Kalau ini mau dilakukan maka harus ditingkatkan pada tahun 2015 elastisitas pertumbuhan itu harus mampu menekan kemiskinan di Sulawesi pada angka 2.25%. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kalau teman-teman Bappeda mau memanfaatkan kajian teman-teman dari Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) , maka akan menarik sekali apa yang bisa kita lakukan agar elastisitas pertumbuhan pada masing-masing provinsi bisa menekan angka kemiskinan. Dari segi ketimpangan, nampaknya dalam 10 terakhir semakin buruk. Ini juga memperlihatkan kita harus kritis pada pertumbuhan yang tinggi di masing-masing provinsi. Artinya pertumbuhan di masing-masing provinsi masih harus diurai lagi dan tidak menjadi bangga dengan angka makro yang tinggi, tapi harus diurai secara lebih detail sehingga bisa menyentuh ke persoalannya.
- Hal yang sama pada IPM, hanya Sulut yang berada di atas rata-rata nasional, provinsi lain berada di bawah rata-rata nasional. Bisakah IPM ini dijadikan sebuah terobosan, yang bisa mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan produktivitas?
- Ini tantangan-tantangan berpikir yg memerlukan sentuhan-sentuhan pengetahuan untuk rumusan kebijakan di pemerintahan daerah di masing-masing provinsi. Untuk

maksud itu, teman-teman JiKTI melalui focal point di daerah masing-masing dengan senang hati membantu kajian-kajian kebijakan dan policy-policy paper. Kita tidak bisa puas dengan angka-angka makro tanpa bisa menyentuh level mikro.

7. Diskusi

Seluruh provinsi sudah memasukkan secara tertulis evaluasi program masing-masing provinsi terkait pencapaian pada RPJMN 2010-2014 dan juga usulan prioritas untuk RPJMN 2015-19 (Lampiran 1: Matriks evaluasi dan usulan prioritas untuk RPJMN 2015-19). Diskusi bersifat tambahan dari masukan tertulis.

Sulawesi Barat

- Yang utama adalah bagaimana kita bisa rumuskan APBD yang berkualitas yang betul-betul berpihak pada rakyat. Yang harus menjadi prioritas juga adalah kerja sama ekonomi antar region di KTI. Sulawesi Barat ingin membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa karena pertanian merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat. 70% masyarakat miskin di sektor pertanian. JiKTI perlu membimbing kita, bagaimana karakteristik wilayah di KTI bisa kita gali agar kita di KTI bisa tumbuh bersama.

Maluku

- Kami di Maluku prihatin dengan banyaknya pendatang dengan SDM yang sangat rendah dan miskin yang datang karena adanya tambang emas di Maluku. Hal ini berpengaruh pada angka kemiskinan di Maluku. Kami mengharapkan adanya kerja sama antar daerah terkait hal ini.
- Dampak lingkungan di Pulau Buru – tambang emas perlu dikaji oleh teman-teman JiKTI.
- Maluku sangat ingin menjalin kerja sama yang serius dengan Sulawesi Tenggara terkait pendatang yang ke Maluku dan menyebabkan angka kemiskinan sangat tinggi di Maluku.
- Kita harus punya satu kesepakatan bahwa Maluku adalah lumbung ikan nasional. Sehingga tahun 2015, semua sudah terfokus sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
- Kita jangan terperangkap dengan ego provinsi, kita harus saling dukung dan bersinergi sebagai satu region, KTI.

Sulawesi Tengah

- Bagaimana JiKTI bisa melakukan study mengenai konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain, kajian mengenai pengembangan daerah pesisir secara terpadu, kajian mengenai daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Sulawesi Utara

- Terkait evaluasi dan prioritas pada RPJMN 2015-19, sudah dimasukkan pada masukan tertulis.

Papua

- Kita arahkan KTI pada titik-titik fokusnya, bagaimana ada keterpaduan antar koridor di KTI.

Sulawesi Selatan

- Perlu diketahui bahwa IPM tidak lagi memasukkan indikator melek huruf sebagai angka indeks yang diperhitungkan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia.
- Pembuatan rencana-rencana aksi oleh Bappeda tidak dimasukkan dalam RPJMN dan berada di luar sistem.

NTB

- Kami sudah kirimkan masukan tertulis terkait evaluasi program terhadap pencapaian pada RPJMN 2010-2014 dan juga masukan program terhadap draft RPJMN 2015-2019
- Kami berharap usulan kami bisa dikawal dan bisa masuk dalam RPJMN 2015-2019

Maluku Utara

- Provinsi Maluku Utara mengusulkan infrastruktur wilayah yang menghubungkan antar pulau, termasuk infrastruktur kelistrikan. Provinsi Maluku Utara membutuhkan listrik sekitar 325 ribu Mega Watt dan yang baru tersedia 75 ribu Mega Watt, berarti masih ada kebutuhan listrik sebesar 250 ribu Mega Watt.
- Ini harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi berupa Grand Design dan diperkuat dengan regulasi.

Sulawesi Tenggara

- Capaian pembangunan di Sultra, hanya angka kemiskinan yang melewati target RPJMN 2010-14. Yang agak berat adalah pada pendapatan per kapita.
- Dampak lingkungan sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara perlu menjadi perhatian. Perlu ada intervensi pemerintah pusat untuk mengatur regulasi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan.
- Harapannya pengolahan tambang perlu dipercepat realisasi pembangunan smelter
- Dengan adanya usaha pertambangan, berpotensi pada pengurangan ketertutupan lahan dan berdampak pada peningkatan emisi karbon. Penting ada regulasi dalam RPJMN 2015-19 yang mengatur hal ini.

Gorontalo

- Salah satu hal yang menarik dari RPJMN adalah tidak dimunculkannya harapan/mimpi wilayah atau setiap provinsi.
- Masing-masing provinsi perlu untuk mengvisualisasikan impian/mimpi dan direfleksikan dalam RPJMN.
- Provinsi perbatasan, perlu ada diskusi khusus antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Nuansa diskusi untuk membangun kerja sama antar wilayah terutama wilayah perbatasan perlu terus dibangun.

JiKTI (Ahmad Zaini – Focal Point JiKTI NTB)

- JiKTI di setiap provinsi terbuka untuk mendukung Bappeda.
- Ada strategi yang perlu kita catat agar usulan kita bisa masuk dalam RPJMN 2015-19. Mari kita evaluasi dan refleksi, apakah masukan yang kita usulkan pada RPJMN yang lalu terefleksi dalam anggaran? Jangan hanya masuk dalam dokumen perencanaan tetapi tidak terefleksikan dalam anggaran.

Kesimpulan

1. Ada kecenderungan bahwa RPJMN 2015-19 berbasis pulau. Hal-hal yang sama dari masing-masing provinsi dalam pulau yang bersangkutan harus diharmonisasikan tetapi spesifikasi daerah tetap harus dimunculkan.
2. RPJMN sangat penting, tetapi kita tidak bisa berharap sepenuhnya pada RPJMN, tapi kita harus berjuang untuk memenangkan prioritas kita di Kementerian/Lembaga. Diharapkan di K/L, rasa kebersamaan harus terus dipupuk.
3. Menyangkut infrastruktur, catatan dari Deputi Sarana/Prasarana sangat penting, Jangan semua berharap dari pemerintah. Kita harus membuat sesuatu yang atraktif untuk menarik sumber pembiayaan.
4. Rencana kunjungan belajar ke China tahun 2013 yang diusulkan oleh Deputi Sarana/Prasarana Bappenas, perlu menjadi catatan untuk tidak diwakili dan harus ada cost sharing dari Bappeda.
5. Pada pertemuan juga disepakati oleh para Kepala Bappeda yang hadir bahwa Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI tetap dijabat oleh Ketua Pokja Forum KTI, Ibu Winarni Monoarfa.